



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BANJARBARU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang1
- B. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran umum organisasi2
- C. Struktur Organisasi.....5
- D. Aspek strategis organisasi dan isu strategis organisasi5
- E. Sistematika Penyajian6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama.....9
- B. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Eselon III 14
- B. Capaian Kinerja Eselon IV26

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan31
- B. Strategi Peningkatan Kinerja 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru. Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria dengan rata-rata capaian baik .

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan

Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, perlindungan atas **bencana**, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/permukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2. Menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi- instansi teknis terkait, seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen PU, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. Selain itu untuk memberikan kekuatan hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan, maka telah ditetapkan perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan melalui inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru Tahun 2016 merupakan

Pertanggung-jawaban kinerja kepala pelaksana BPBD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kota Banjarbaru pada tahun 2021, yang secara langsung menggambarkan keberhasilan, hambatan dan tantangan.

Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja

tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Banjarbaru Tahun 2022 ini disusun dengan menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di bagian penanggulangan bencana. Laporan ini juga merupakan wujud dari transparansi BPBD Kota Banjarbaru dalam melaksanakan berbagai kewajiban serta menyajikan capaian seperangkat indikator kinerja BPBD Kota Banjarbaru.

Peran BPBD Kota dalam melaksanakan penanggulangan bencana dikaitkan dengan Visi wali kota :

“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)”

BANJARBARU JUARA dimaknai sebagai motivasi atau semangat yang mampu menumbuhkan kekuatan dan daya juang sehingga Kota Banjarbaru memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lainnya.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPBD Kota Banjarbaru dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BPBD Kota Banjarbaru harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Banjarbaru, BPBD berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke- 1 dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Visi BPBD Kota Banjarbaru

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah :

“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)”

Visi pembangunan Kota Banjarbaru 2021 - 2026 tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Tahun 2021 - 2026 yakni TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA EMPAT DIMENSI YANG MANDIRI DAN TERDEPAN yakni Kota Pendidikan, Kota Jasa, Industri dan Perdagangan; Kota Pemukiman dan Kota Pemerintahan yang Mandiri dan Terdepan.

BANJARBARU MAJU adalah cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

BANJARBARU MAJU lebih kepada jawaban terhadap tujuan prioritas yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah tahap ke V RPJPD Kota Banjarbaru tahun 2021 – 2025 yakni mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama dibidang pendidikan, perdagangan, industry pengolahan dan jasa, pemerintahan dan pemukiman.

BANJARBARU AGAMIS dapat dimaknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025.

Sedangkan **BANJARBARU SEJAHTERA** sebagai prioritas dalam visi pembangunan Kota Banjarbaru 2021-2025 hal ini sudah sesuai tujuan RPJPD Kota Banjarbaru 2005 – 2025 yakni masyarakat/SDM yang berkualitas, menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan pemerintahan yang baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun

2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan local dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kota Banjarbaru untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

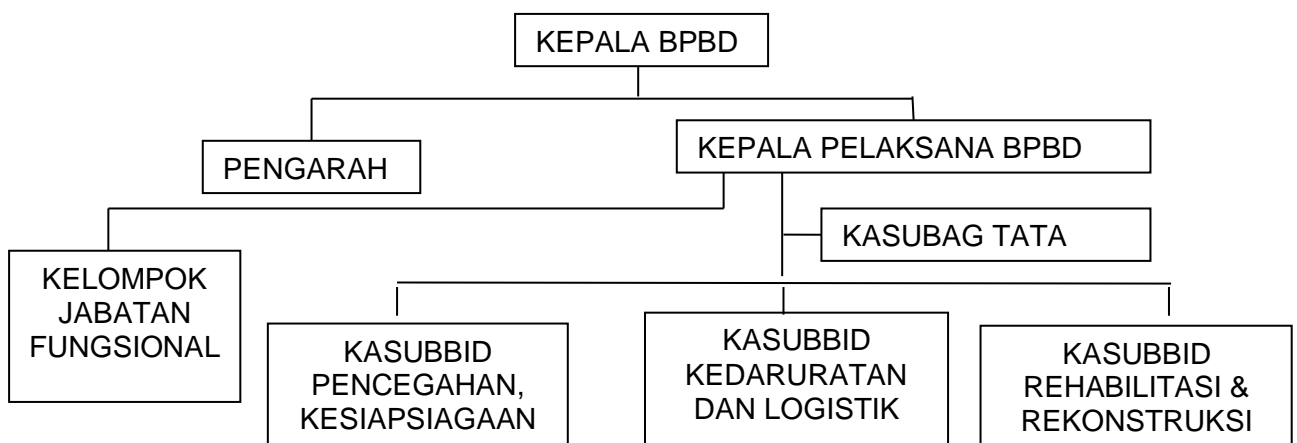
Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 09 Tahun 2016 Tentang tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, terdiri dari :

1. KALAK (Kepala Pelaksana) Sekretaris Kota Banjarbaru
2. KALAHAR (Kepala Pelaksana Harian)

3. Kasubbag Tata Usaha
4. Kasubid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5. Kasubid Kedaruratan dan Logistik
6. Kasubid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7. Kelompok Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sebagai berikut :



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi berpedoman pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 09 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru yang secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan sebagai berikut :

1. Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana alam secara adil dan merata.
11. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
12. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulanagn bencana.
13. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana.
14. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana.

15. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana.
16. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.
17. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
18. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
19. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas.

1.4 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan dalam merancang strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*).

1. Kekuatan (*Strengths*):
 - a) Tingkat pemahaman dan ketrampilan Sumber Daya Manusia yang semakin meningkat dalam mengantisipasi bencana.
 - b) Terciptanya koordinasi kelembagaan yang baik diantara unit-unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - c) Ketersediaan sumber dana pemerintah.
2. Kelemahan (*Weaknesses*):
 - a) Terbatasnya sarana dan prasarana kerja khususnya armada baik jumlah maupun kualitasnya.

- b) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia.
 - c) Belum terpenuhinya sarana sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana.
 - d) Belum memadainya sarana prasarana penanganan bencana dalam rangka pendekatan pelayanan kepada korban bencana
3. Peluang (Opportunities):
- a) Semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana.
 - b) Adanya pendidikan dan pelatihan serta kursus yang berkaitan dengan kebencanaan.
 - c) Adanya kerja sama dan dukungan dari instansi pemerintah lain yang terkait.
4. Ancaman (Threats):
- a) Tuntutan peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
 - b) Cuaca yang tidak menentu.

b. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2021-2026, BPBD Kota Banjarbaru dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Banjarbaru pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Banjarbaru Seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan

penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

- 1.1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah :
- 1.2. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat.

2 Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan

rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

- 2.1 Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- 2.2. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;
- 2.3. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta
- 2.4. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah. Masih rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, Meliputi rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain:

(1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; (3) Belum terbentuknya kelembagaan dimasyarakat sebagai upaya penanggulangan bencana; (4) Masih kurangnya perhatian terhadap pengintegrasian pengurangan resiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah. Padahal memperhatikan besarnya potensi ancaman berbagai bencana di Kota Banjarbaru perlu disikapi oleh pengambil kebijakan secara terintegrasi dan komprehensif.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian dalam penulisan ini akan terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab tersebut terdiri dari sub bab yang akan menjelaskan secara sistematis.

LAKIP Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran umum organisasi
- 1.3. Struktur organisasi
- 1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyajian

BAB II. Perencanaan Kinerja

- 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama
- 2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Capaian Kinerja Eselon III
- 3.2. Capaian Kinerja Eselon IV dan Sub Koordinator

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis BPBD Kota Banjarbaru Tahun 2021- 2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang selaras dengan arah kebijakan Visi dan Misi Walikota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan dalam bentuk dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Misi 1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berahklak Mulia
Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Nilai Agama dan Budaya
Sasaran 5	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan Budaya Lokal
Program	Program Penanggulangan Bencana

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

A Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja utama, Perjanjian kinerja tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel Perjanjian Kerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET
Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	Cakupan pelaksanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat	Program penanggulangan bencana	100 %
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %

Perjanjian kinerja organisasi tersebut di atas realisasi dan capaiannya merupakan tanggungjawab Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kinerja individu dengan data terlampir.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Lancarnya administrasi perkantoran	Cakupan disiplin aparatur	100%
		Meningkatnya pelayanan akuntabilitas kinerja	100%
		Meningkatnya sarana prasarana aparatur	100%
		Terpeliharanya sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%
2.	Meningkatnya kinerja fisik dan keuangan	Meningkatnya jasa jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	100%

Perjanjian kinerja organisasi tersebut di atas realisasi dan capaiannya merupakan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kinerja individu dengan data terlampir.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase informasi rawan bencana yang tersampaikan	100%
2.	Peningkatan pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase tertanganinya korban bencana	100%

Perjanjian kinerja organisasi tersebut di atas realisasi dan capaiannya merupakan tanggung jawab Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kinerja individu dengan data terlampir.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan pelayanan dan evakuasi korban bencana	Persentase korban bencana yang terselamatkan	100%

Perjanjian kinerja organisasi tersebut di atas realisasi dan capaiannya merupakan tanggung jawab Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kinerja individu dengan data terlampir.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase tertanganinya korban bencana	100%
2.	Peningkatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata	100%

Perjanjian kinerja organisasi tersebut di atas realisasi dan capaiannya merupakan tanggung jawab Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan

rekonstruksi Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kinerja individu dengan data terlampir.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Nomor : Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021- 2026 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, ditetapkan beberapa indikator kinerja utama untuk mengimplementasikan perencanaan strategis ke dalam indikator kinerja

kegiatan (Outcome) yang mengacu kepada sasaran strategis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	Cakupan pelaksanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat	Persentase penanggulangan bencana + persentase penanganan pasca bencana di bagi 2	Bidang PK, RR, KL	BPBD Kota Banjarbaru

Indikator Kinerja Utama kemudian dijadikan sasaran kinerja organisasi dengantampilan tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022				KETERANGAN / ALASAN BELUM TERCAPAI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	100%	100%	100%	100%	-

2.2 RENCANA KERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2022

Realisasi anggaran

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.759.875.350
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1.684.706.050
Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.493.386.050
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	185.820.000
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.500.000
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	25.382.500
Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25.382.500
Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	317.052.500
Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000
Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	111.632.500
Sub kegiatan barang cetakan dan pengadaan	15.000.000
Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000
Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	171.820.000
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	112.140.000
Sub kegiatan pengadaan mebel	23.750.000
Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	27.400.000
Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	60.990.000
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.315.000
Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	1.485.000
Sub Kegiatan jasa komunikasi,	21.630.000

sumber daya air dan listrik	
Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	25.200.000
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	572.279.300
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	34.997.000
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	228.732.300
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	11.950.000
Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	21.600.000
Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	275.000.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.705.568.250
Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	147.467.000
Sub kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota	147.467.000
Kegiatan pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	522.981.000
Sub kegiatan pelatihan Pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	50.017.000
Sub kegiatan penanganan pasca bencana kabupaten/kota	102.244.000
Sub Kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	370.720.000
Kegiatan pelayanan dan evakuasi korban bencana	1.917.640.250
Sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupten/kota	1.917.640.250
Kegiatan Penataan system dasar penanggulangan bencana	117.480.000
Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	117.480.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru menjunjung semangat dan komitmen melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dan dalam rangka menentukan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah, maka BPBD Kota Banjarbaru telah membuat perencanaan yang dituangkan dalam RENSTRA periode 2021-2026 dan berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru, Sebagai alat ukur untuk menentukan pencapaian kinerja maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru telah menentukan beberapa indikator kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022

Tabel I.1

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KONDISI 2021	TARGET 2022
Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	100%	100%

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, Visi dan Misi Kota Banjarbaru adalah

Visi : *BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA*
(BANJARBARU JUARA)

Terdiri atas tiga aspek penting yaitu :

- 1 cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi
- 2 Di maknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berahklak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025.
- 3 SDM yang berkualitas menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan pemerintahan yang baik

Sedangkan Misi Kota Banjarbaru adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berahklak Mulia
2. Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Misi dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021 – 2026 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005 – 2025 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru 2021 -2026 pada misi 5 sebagai berikut :

Misi 1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berahklak Mulia
Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Nilai Agama dan Budaya
Sasaran 5	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan Budaya Lokal
Indikator Kinerja	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat
Program	1. Program penanggulangan bencana

3.1 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Esselon III

Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelaksanaan pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan pelaksanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat	100 %	100%	100%

Realisasi dan capaian kinerja tersebut diatas kami detilkan kedalam bentuk analisis sebagai berikut :

Indikator “Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat “ dengan target sebesar 70% dan terealisasi 66%.

Realisasi dan capaian dapat diukur dengan rumus :

Persentase penanggulangan bencana + persentase penanganan pasca bencana di bagi 2

Dari table pengukuran kinerja di atas dapat dijelaskan hasil capaian indikator sasaran BPBD Kota Banjarbaru untuk tahun 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana

Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana adalah perwujudan kewajiban BPBD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan melalui system penanggung jawaban periodik.

Sepanjang tahun 2022, terdapat **84** kejadian bencana, yaitu Kejadian bencana banjir sebanyak **36** kali, KARHUTLA **34** serta bencana puting beliung sebanyak 14 kali. Dari 84 kejadian bencana tersebut , seluruh kejadian bencana berhasil ditangani dalam bentuk penanganan darurat oleh BPBD Kota Banjarbaru, melalui pengerahan semua sumber daya yang dimiliki, maupun dengan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk relawan damkar, MPB (Masyarakat Peduli Bencana) dan TRC (Tim Reaksi Cepat).

Data kejadian dapat dilihat dari table dibawah:

No	Nama Kelurahan	Kejadian Bencana				Jumlah Luas Hektar (KARHUTLA)	
		Banjir	KARHUTLA	Puting Beliung	Tanah Longsor		
1.	Banjarbaru Utara	1	6	2	nihil	- (±)26 Jiwa (banjir) - (±)8 jiwa (puting beliung)	(±) 2H
2.	Banjarbaru Selatan	7	1	3	nihil	- (±)335 Jiwa (banjir) - (±)10jiwa (puting beliung)	(±) 1H
3.	Cempaka	14	15	1	nihil	- (±)2938 Jiwa (banjir) - (±)6 jiwa (puting beliung)	(±) 23H
4.	Landasan Ulin	7	9	8	nihil	- (±)378 Jiwa (banjir) - (±)33 jiwa (puting beliung)	(±) 8,59H
5.	Liang Anggang	8	3		nihil	- (±)188 Jiwa (banjir)	(±) 2,05H

(Sumber data kejadian bencana 2022 BPBD Kota Banjarbaru)

Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya

capaian yang **dinilai berhasil** ini dilaksanakan melalui Program :

No	Program	Target		Relisasi		(%)
		Kinerja	anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.759.875.350	100%	2.569.536.407	98%
2	Program penanggulangan bencana	100%	2.705.568.250	100%	2.430.262.822	99%

Rekapitulasi program dan kegiatan rutin BPBD Kota Banjarbaru dapat

No	Program	Target		Relisasi		(%)
		Kinerja	anggaran	Kinerj a	Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.759.875.350	100%	2.569.536.407	90%

dilihat dari table dibawah ini:

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk program rutin sebesar Rp. 2.759.875.350,- dengai realisasi mencapai 98% atau sebesar Rp. 2.569.536.407,-. Rincian program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja BPBD Kota Banjarbaru ini dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
1.684.706.050	1.554.821.289	92%

b. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
25.805.000	24.150.000	95%

c. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
272.821.500	314.083.936	99%

- d. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
112.140.000	111.400.000	99%

- e. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
48.315.000	44.834.382	93%

- f. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
572.279.300	520.246.800	91

Selain program rutin. Program pada urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Banjarbaru dapat dilihat dari table dibawah ini :

No	Program	Target		Relisasi		(%)
		Kinerja	anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.	Program penanggulangan bencana	100%	2.705.568.250	100%	2.430.262.822	99%

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk program Penanggulangan Bencana sebesar Rp.2.705.568.250,- dengan realisasi mencapai 90% atau Rp.2.430.262.822,-. Rincian program dan kegiatan yang mendukung rencana kerja BPBD Kota Banjarbaru dapat dilihat pada uraian berikut :

a. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
147.467.000	144.670.000	98

b. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
522.981.000	499.875.822	96

c. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
1.917.640.250	1.668.237.500	87

d. Kegiatan penataan system dasar penanggulangan bencana

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
117.480.000	117.479.500	100

Perbandingan kinerja selama 2 tahun terakhir :

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda / Perkada	100%	95%	100%	100%	100%	100%

Bila dibandingkan dengan tercapai, tahun 2020 sebesar 95% tahun 2021 sebesar 100% pada tahun ini capaian sebesar 100% lebih kurang sama bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun upaya yang telah dilakukan tahun ini yaitu:

Upaya yang dilakukan BPBD Kota Banjarbaru agar tercapainya capaian kinerja “Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana” adalah sebagai berikut:

1. Mengedukasi masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat,

media sosial berupa penyuluhanm penyebaran brosur dan spanduk siaga bencana.

2. Melakukan sosialisasi ke sebagian kelurahan sesuai dengan target tirwulan
3. Melakukan koordinasi yang insentif kepada pihak pihak terkait
4. Pembentukan Posko Siaga Bencana yang dilakukan pada semester 2
5. Melakukan kegiatan kajian risiko bencana
6. Tersedianya peta rawan bencana

Hambatan yang mempengaruhi tercapainya capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kerjasama dengan stakeholder eksternal yang menyebabkan sulitnya pendataan maupun evakuasi
2. Bencana yang sulit diprediksi
3. Serta kondisi gudang yang kurang memadai untuk penyimpanan bantuan logistik korban bencana.

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan koordinasi yang lebih insentif dengan instansi terkait agar bisa lebih menunjang keberhasilan capaian target
2. Mengoptimalisasi pegawai dan sarana prasarana yang ada
3. Menyusun anggaran untuk sinkronisasi kegiatan, Lain- lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. Melakukan kegiatan JITUPASNA

Capaian Kinerja Esselon IV

a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase informasi rawan bencana yang tersampaikan	100%	100%	100%
2.	Peningkatan pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase tertanganinya korban bencana	100%	100%	100%

Realisasi dan Capaian Kinerja tersebut diatas kami detilkan dalam bentuk analisis sebagai berikut :

Indikator “ Persentase informasi rawan bencana yang tersampaikan serta persentase tertanganinya korban bencana ” dengan target 100% terealisasi 100% .

Kegiatan pendukung sasaran “ Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Peningkatan pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ” yaitu Sosialisasi, Informasi dan Komunikasi (KIE) rawan bencana, simulasi penanggulangan bencana dan Pengadaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana

Upaya yang telah dilakukan yaitu:

- capaian “Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana” dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan sosialisasi yang diadakan BPBD Kota Banjarbaru sebanyak 4 kali dan dihadiri 400 orang dari masyarakat maupun perwakilan dari kelurahan, serta penyebaran brosur ke masyarakat daerah rawan bencana
- Tersedianya peta rawan bencana
- Terlaksananya pelatihan pencegahan bencana
- Pengadaan sarana prasarana penunjang kebencanaan

- a. Sub kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
200 orang	200 orang	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
147.467.000	144.670.000	98%

- b. Sub kegiatan pelatihan penanganan dan mitigasi bencana kabupaten/kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
1 kali	1 kali	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
50.017.000	45.395.500	91%

- c. Sub kegiatan pengendalian operasi penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
2 dokumen	2 dokumen	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
370.720.000	354.100.322	98%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian ini dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp.568.204.000,- terealisasi Rp. 544.165.822,-

Perbandingan kinerja selama 2 tahun terakhir :

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	100	100	100	100	100
2.	Peningkatan pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100

b. Seksi Kedaruratan dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan pelayanan dan evakuasi korban bencana	Persentase korban bencana yang terselamatkan	100%	100%	100%

Realisasi dan Capaian Kinerja tersebut diatas kami detilkan dalam bentuk analisis sebagai berikut :

Indikator “ Persentase korban bencana yang terselamatkan” dengan target 100 % dan terealisasi 100%.

Kegiatan pendukung sasaran “ Peningkatan pelayanan dan evakuasi korban bencana” yaitu evakuasi korban bencana yang terdampak dan kegiatan posko siaga bencana .

Adapun upaya yang telah dilakukan tahun ini yaitu:

- Terlaksananya kegiatan posko bencana
- Tersedianya logistik untuk korban bencana

- a. Sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kab/kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
10 jenis	10 jenis	100%
2 unit	2 unit	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
1.917.640.250	1.668.237.500	87%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian ini dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.917.640.250,- terealisasi Rp. 1.668.237.500,- Dalam pelaksanaannya telah terjadi efisiensi terhadap anggaran Rp. 249.402.750,-.

Perbandingan kinerja selama 2 tahun terakhir :

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase korban bencana yang terselamatkan	100	100%	100	100%	100	100%

c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase tertanganinya korban bencana	100%	100%	100%

2.	Peningkatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata	100%	100%	100%
----	--	---	------	------	------

Realisasi dan Capaian Kinerja tersebut diatas kami detilkan dalam bentuk analisis sebagai berikut :

Indikator “ Persentase tertanganinya korban bencana dan Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata ” dengan target 100 % dan terealisasi 100%.

Kegiatan pendukung sasaran “ Peningkatan pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Peningkatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana” yaitu Kerjasama antar Lembaga serta penanganan pasca bencana .

Adapun upaya yang telah dilakukan tahun ini yaitu:

- Melakukan koordinasi yang intensif ke pihak pihak yang terkait
- Tersedianya peta rawan bencana

a. Sub kegiatan pasca bencana kabupaten/kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 bulan	12 bulan	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
370.720.000	354.100.322	98%

- b. Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
1 dokumen	1 dokumen	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
117.480.000	117.479.000	100%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian ini dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp.488.200.000,- terealisasi Rp. 471.579.322,- Dalam pelaksanaannya telah terjadi efisiensi terhadap anggaran Rp. 16.620678,-.

Perbandingan kinerja selama 2 tahun terakhir :

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase tertanganinya korban bencana	100	100%	100	100%	100	100%
2.	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata	100	100%	100	100%	100	100%

BAB IV

PENUTUP

. KESIMPULAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Secara keseluruhan Capaian Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun anggaran 2022 berada dalam kategori Baik Sekali, namun pada sisi anggaran, ada penyerapan anggaran pada sasaran yang mengalami penurunan dengan alasan tidak terserapnya dana anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran. Hal itu terjadi karena kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru

A. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mendukung program kerja yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarbaru masih memiliki hambatan dan kendala antara lain :

1. Masih kurangnya kerjasama dengan stakeholder eksternal yang menyebabkan sulitnya pendataan maupun evakuasi
2. Bencana yang sulit diprediksi
3. Serta kondisi gudang yang kurang memadai untuk penyimpanan bantuan logistik korban bencana.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja khususnya armada baik jumlah maupun kualitasnya.
5. Belum memadainya sarana prasarana penanganan bencana dalam rangka pendekatan pelayanan kepada korban bencana

Langkah-langkah yang dilakukan untuk masa yang akan datang antara lain :

1. Meningkatkan dan mempertahankan responsifitas dalam penanganan bencana.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan media sosial berupa penyuluhan, penyebaran brosur, dan spanduk.
3. Melengkapi petugas dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Mengadakan pelatihan bagi personil yang terlibat satgas kebencanaan.
5. Menghindari Ego Sektor dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dalam menangani masalah bencana dilapangan.
6. Melakukan tindakan secara professional dan penegakan hukum.
7. Semua lapisan pemerintah, masyarakat dan swasta ikut serta berpartisipasi dalam menangani bencana.


Banjarbaru, Januari 2023
KEPALA PELAKSANA BPBD
KOTA BANJARBARU,
Zaini, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19701009 200003 1 004